

KEUANGAN INKLUSIF: PILAR STRATEGIS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Ahmad Ma'ruf¹
Sabila Yusrina²

Abstract: Inclusive Finance: Strategic Pillar Asean Economic Community. *This study aims to analyze the determinants of Inclusive Finance as a strategic pillar for the success of the ASEAN Economic Community (AEC). Financial sector deepening is a goal in the AEC blueprint. Financial Inclusion is identified as an important factor for the development of ASEAN member countries through a regional approach. Inclusive Finance is one way to socialize the financial sector in particular to facilitate banking services and financial access for the community. The inclusive financial level is seen from the Inclusive Finance Index with dimensions of penetration, availability and usage. Determinants of inclusive finance include Human Development Index (IPM), Villagers, and Road Infrastructure analyzed using panel data with 7 countries cross section of 2010-2015 period. The results of this study indicate the ASEAN Inclusive Finance position of ASEAN member countries entering the AEC in the medium category. The HDI and road infrastructure variables positively affect the Inclusive Finance in ASEAN, while the rural population has a negative influence. Inclusive financial strengthening is very strategic for achieving AEC objectives.*

Abstrak: Keuangan Inklusif: Pilar Strategis Asean Economic Community. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan Keuangan Inklusif sebagai pilar strategis untuk kesuksesan ASEAN Economic Community (AEC). *Financial sector deepening* merupakan tujuan dalam AEC blueprint. *Financial Inclusion* diidentifikasi sebagai faktor penting bagi pembangunan negara anggota ASEAN melalui pendekatan regional. Keuangan inklusif merupakan salah satu cara untuk memasyarakatkan sektor keuangan khususnya mempermudah layanan jasa perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat. Tingkat keuangan inklusif terlihat dari Indeks Keuangan Inklusif dengan dimensi penetrasi, ketersediaan, dan penggunaan. Determinan keuangan inklusif antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penduduk Desa, dan Infrastruktur jalan raya yang dianalisis menggunakan data panel dengan cross section 7 negara periode tahun 2010-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan posisi Keuangan Inklusif negara anggota ASEAN memasuki AEC pada kategori sedang. Variabel IPM dan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN, sedangkan populasi desa memiliki pengaruh yang negatif. Penguatan keuangan inklusif sangat strategis untuk pencapaian tujuan AEC.

Kata Kunci: Keuangan Inklusif, ASEAN Economic Community

¹ Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, email: macrov_jogja@yahoo.com

² Peneliti Junior di Institute of Public Policy and Economic Studies, email: sabila.yusrina10@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan suatu negara terutama dalam mengentaskan kemiskinan (Ali, Son, 2007, UNDP, 2015). Berbagai upaya kerjasama dilakukan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta stabilitas keamanan yang terjaga seperti hubungan kerja sama yang dilaksanakan oleh negara di sekitar Asia Tenggara, yang dikenal dengan sebutan ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang telah dilakukan adalah *ASEAN Economic Community* (AEC).

Pelaksanaan AEC memberikan peluang positif bagi pembangunan domestik maupun pengembangan internasional dengan memanfaatkan liberalisasi perdagangan, (Afandi, 2011, AbduRofiq, 2014). Melalui prosedur dan pengembangan profesionalitas yang jelas maka AEC akan mampu merubah tantangan menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (World Bank, 2013). Negara berkembang di Asia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat, terutama negara ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia pada tahun 2030. Hal ini terkait dengan faktor pendukung seperti perdagangan intra-ASEAN yang meningkat pesat dari 25 persen menjadi 30 persen dengan total pendapatan perkapita mencapai 2,5 Triliun USD dalam kurun waktu 5 tahun setelah AEC diluncurkan. Pertumbuhan ASEAN berdampak pada terjadinya perubahan signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, perluasan akses informal dan edukasi, persiapan menghadapi bencana, serta mempersempit kesenjangan antara negara-negara anggota.

Pertumbuhan ekonomi salah satunya didukung oleh sektor keuangan baik perbankan maupun non bank (Cheng dan Degryse, 2006). Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Kondisi sekarang, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum sepenuhnya disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Selain karena kondisi pasar sektor perbankan, hambatan terhadap akses perbankan juga dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan perbankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian (Beck dkk, 2006, Bank Indonesia, 2014).

Upaya untuk mengatasi keterbatasan akses layanan jasa keuangan tersebut, maka muncul suatu program perluasan akses layanan keuangan yang disebut dengan keuangan inklusif. Keuangan inklusif mempromosikan akses dan penggunaan layanan keuangan berkualitas tinggi secara global, khususnya di antara orang-orang miskin berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses dan menggunakan jasa keuangan (Sarma, 2012, Steelyana, 2013). Sektor keuangan merupakan inti dari proses pembangunan. Pentingnya keuangan inklusif yang berdasarkan atas prinsip pemerataan dan pertumbuhan harus menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan, untuk itu keuangan inklusif sangat dibutuhkan dalam proses pengentasan kemiskinan (Kunt dkk, 2008, Sanjaya, 2014).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuangan inklusif suatu negara dapat disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, infrastruktur dan edukasi pada masyarakat (Sarma dan Pais, 2011, Migap dkk, 2015). Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori sosial ekonomi antara lain jumlah angka melek huruf, pendapatan per kapita, dan pengangguran. Sementara itu, untuk kategori infrastruktur dapat berupa jaringan jalan aspal.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis keuangan inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC. Negara ASEAN yang diamat dalam riset ini adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Determinan keuangan inklusif adalah faktor sosial ekonomi yang diprosikan dengan Indeks Pembangunan

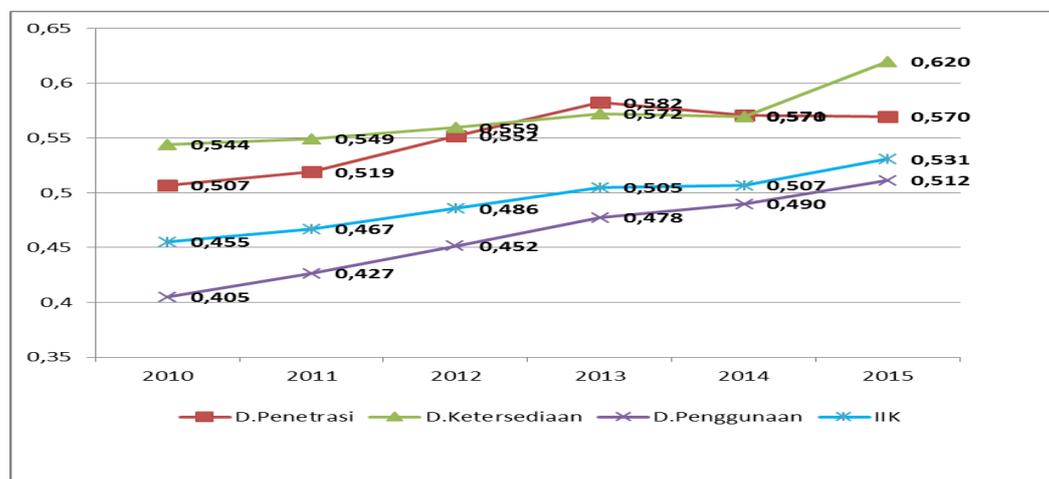
Manusia (IPM), dan jumlah populasi desa serta infrastruktur yang diproksikan dengan panjang jaringan jalan aspal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan indeks keuangan inklusif di negara ASEAN serta faktor yang mempengaruhinya sebagai strategi pencapaian tujuan AEC.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini berupa analisis kuantitatif menggunakan data sekunder dari tahun 2010-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari UNDP, IMF, World Bank, dan sumber-sumber lain yang terkait. Alat analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan/hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks keuangan inklusif dibentuk oleh tiga dimensi yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Nilai indeks keuangan inklusif dari tujuh negara di ASEAN periode tahun 2010-2015 memiliki skor indeks >0.3 yang berarti rata-rata keuangan inklusif di negara-negara ASEAN tergolong sedang, dengan trend nilai indeks keuangan inklusif yang positif. Ada beberapa kategori indeks keuangan inklusif (Sarma, 2012), yaitu tinggi ($0,6 < d \leq 1$), sedang ($0,3 \leq d \leq 0,6$) dan rendah ($< 0,3$). Pada tahun 2010 nilai indeks keuangan inklusif di ASEAN sebesar 0,455 dan meningkat menjadi 0,531 pada tahun 2015.



Sumber : Data diolah, 2016

GAMBAR 1. Indeks Keuangan Inklusif Negara ASEAN dan Dimensinya

Peningkatan keuangan inklusif di ASEAN, dikarenakan adanya peningkatan dari setiap dimensi keuangan inklusif yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan perbankan dan penggunaan jasa perbankan di ASEAN. Peningkatan ini juga menggambarkan bahwa akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat, khususnya bank umum konvensional, mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya sektor perbankan di ASEAN.

Rata-rata masing-masing dimensi pembentuk indeks keuangan inklusif di ASEAN tergolong sedang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi ketersediaan jasa perbankan memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan dimensi penetrasi dan dimensi penggunaan yakni dikisaran angka 0,544 sampai dengan 0,620, yang mengindikasikan terjadinya pertumbuhan positif pada jumlah kantor cabang. Semakin banyak kantor cabang bank, peluang masyarakat menjangkau layanan jasa keuangan semakin tinggi.

Dimensi penetrasi perbankan di ASEAN juga tergolong sedang dengan skor indeks sebesar 0,507. Hal ini menunjukkan dengan jumlah rekening deposit di ASEAN mencapai 9,8 juta unit menandakan semakin banyak orang yang mengakses jasa perbankan di ASEAN. Sama halnya dengan dimensi penetrasi dan ketersediaan, dimensi penggunaan juga tergolong dalam kategori sedang. Periode tahun 2010-2015, penggunaan jasa perbankan masyarakat ASEAN terus mengalami peningkatan. Peningkatan pada dimensi penggunaan ini menunjukkan adanya peningkatan pada volume tabungan yang dihimpun yang berimplikasi pada kenaikan nilai kredit oleh perbankan di ASEAN.

Dimensi ketersediaan perbankan lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi penetrasi perbankan. Jumlah kantor cabang bank relatif banyak namun jumlah orang yang memiliki rekening cenderung sedang. Tingginya dimensi ketersediaan diduga terkait dengan pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Selain itu, faktor pergerakan penduduk yang terjadi di ASEAN yang meningkat sebagai efek kesepakatan AEC. Mobilitas penduduk diikuti oleh peningkatan kebutuhan layanan jasa keuangan, yang oleh sektor perbankan diantisipasi dengan penambahan kantor layanan jasa keuangan pada negara-negara ASEAN. Rendahnya penetrasi perbankan dapat disebabkan oleh beberapa faktor (Ummah, 2015), yaitu 1) meskipun perbankan memiliki banyak nasabah, namun volume transaksi relatif kecil. Besarnya transaksi terlihat pada dimensi penggunaan; dan 2) pemberian bobot yang sama dalam perhitungan indeks dimensi, padahal penetrasi perbankan seharusnya diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan dimensi lainnya karena jumlah pengguna jasa perbankan merupakan indikator penting dari jasa keuangan yang inklusif. Jasa keuangan akan semakin inklusif apabila pengguna jasa perbankan tersebut semakin banyak.

Pemberlakuan AEC mengakibatkan semua negara ASEAN dituntut untuk bisa berdaya saing global. Kinerja perekonomian suatu negara sangat ditopang oleh kinerja ekonomi masyarakatnya. Semakin banyak masyarakat yang andil dalam menggerakkan roda perekonomian maka semakin besar pula peluang negara untuk meningkatkan pendapatannya, yang terindikasi dari nilai pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan usaha rakyat adalah dengan mempermudah layanan akses jasa perbankan. Semakin mudahnya akses layanan jasa keuangan maka akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Determinan Indeks Keuangan Inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC pada riset ini menggunakan fungsi sebagai berikut:

$$\text{Log} Y_{it} = \beta_0 + \text{Log} \beta_1 X_{1it} + \text{Log} \beta_2 X_{2it} + \text{Log} \beta_3 X_{3it} + \text{Log} \beta_4 X_{4it} + \varepsilon$$

Keterangan :

Log Y_{it}	= Indeks Keuangan Inklusif
β_0	= Konstanta
Log β_{1234}	= Koefisien variabel 1,2,3,4
Log X_1	= Indeks Pembangunan Manusia
Log X_2	= Populasi Desa
Log X_3	= Infrastruktur Jalan
I	= Negara
t	= Periode Waktu ke-t
ε	= <i>Error Term</i>

Berdasarkan uji Park, nilai probabilitas dari semua variabel independen tidak signifikan pada tingkat 5% yang berarti ada varian yang sama atau terjadi homoskedastisitas antara nilai-nilai variabel independen dengan residual setiap variabel itu sendiri. Selain itu, tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen yang ditunjukkan dari tidak adanya koefisien korelasi antar variabel yang lebih besar dari 0,9.

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Estimasi Model

Variabel Dependen: IKI	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta	-1.366632	-1.412908	-0.914012
Standar error	0.627158	0.239820	0.521288
T-Statistic	-2.179088	-5.891528	-1.753372
Probabilitas	0.0373	0.0000	0.0878
IPM	0.730095	3.001541	1.548267
Standar error	0.080736	0.375563	0.582111
T-Statistic	9.043003	7.992106	2.659744
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0115
Populasi Desa	-0.441327	-1.090487	-0.459450
Standar error	0.067859	0.180122	0.283851
T-Statistic	-6.503550	-6.054167	-1.618633
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.1140
Infrastruktur Jalan	0.013219	0.014543	0.044788
Standar error	0.007469	0.015991	0.016294
T-Statistic	1.769802	0.909438	2.748770
Probabilitas	0.0848	0.3701	0.0092
R²	0.826506	0.998008	0.552778
F-Statistic	15.24434	1725.956	15.24434
Prob (F-Stat)	0.000001	0.000000	0.000001
Durbin-Watson Stat	0.084327	1.404532	0.776371

Sumber: Hasil olah data, 2016

Hasil uji Chow menunjukkan kedua nilai probabilitas Cross Section F lebih kecil dari Alpha 0.05 sehingga dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan model *fixed effect*. Demikian juga, hasil uji Hausman nilai probabilitas Cross-section lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

Hasil olah data menggunakan *Fixed Effect Model* diperoleh nilai R-squared sebesar 0,998. Hal ini menandakan bahwa model ini mampu menjelaskan 99,80 persen, sedangkan sisanya 0,2 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Signifikansi Bersama-sama/Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel bebas secara keseluruhan dengan yang diperoleh, yaitu IPM, Populasi Desa dan Jalan Aspal terhadap Indeks Keuanagan Inklusif di ASEAN. Hasil olah data diketahui nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0000 (signifikan pada 5%), artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t) bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut disajikan tabel uji t-statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Populasi Desa dan Jaringan Jalan Aspal terhadap keuangan inklusif di ASEAN dalam kebijakan AEC.

Tabel 2.
Hasil Uji t-statistik

Variabel	Koefisien Regresi	Prob.	Standar Prob.
Indeks Pembangunan Manusia	3.001541	0.0000	0,05
Populasi	-1.090487	0.0000	0,05
Infrastruktur Jalan	0.014543	0.3701	0,05

Sumber: Hasil olah data, 2016

Koefisien regresi untuk variabel IPM sebesar 3.001541 dengan probabilitas sebesar 0.0000 signifikan pada taraf nyata 5 persen, memiliki makna bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di ASEAN. Hasil uji t-statistik untuk Populasi Desa memiliki koefisien regresi negatif sebesar -1.090487 dengan probabilitas sebesar 0.0000 dan signifikan pada taraf nyata 5 persen, yang mengindikasikan bahwa populasi desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di ASEAN. Sementara itu, infrastruktur jalan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.014543 yang signifikan pada taraf nyata 5 persen.

Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di ASEAN. IPM merupakan indeks komposit dari variabel harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata bersekolah dan PDB riil per kapita. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sarma (2012) dan Ummah (2015) yang menunjukkan bahwa PDB dan Angka Melek Huruf yang merupakan indikator pembentuk IPM memiliki pengaruh positif terhadap keuangan inklusif. Seluruh negara di ASEAN memiliki tren IPM yang meningkat dari tahun ke tahun yang searah dengan trend positif tingkat keuangan inklusif setiap negara ASEAN tahun 2010-2015. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perekonomian sejalan dengan peningkatan keuangan inklusif di ASEAN.

Peningkatan IPM merupakan indikasi keberhasilan pembangunan di suatu negara. Kondisi perekonomian yang membaik menjadi signal bagi perbankan untuk memperluas jaringannya sehingga akses perbankan semakin terbuka. Peningkatan IPM juga mencerminkan peningkatan produktivitas masyarakat. Semakin produktif masyarakat, maka semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat, kebutuhan masyarakat menggunakan jasa perbankan semakin besar, baik untuk kegiatan menabung, investasi, ataupun keperluan transaksi lainnya.

Seiring dengan diluncurkannya AEC tahun 2015, tingkat persaingan ekonomi semakin ketat. Hal ini menuntut masyarakat untuk memiliki kapasitas yang kompetitif dalam AEC. Semakin tinggi kualitas pembangunan manusia, semakin berpeluang menghasilkan masyarakat yang berdaya saing untuk menggerakkan perekonomian secara agregat. Sementara itu, populasi di desa berpengaruh negatif terhadap keuangan inklusif, yang mengindikasikan proses mobilitas penduduk, termasuk urbanisasi berpengaruh positif terhadap keuangan inklusif di ASEAN. Pada wilayah desa secara umum ketersediaan jasa keuangan bank masih terbatas, Kondisi geografis yang tidak didukung infrastruktur yang memadai menjadikan pengembangan pembangunan layanan jasa keuangan di daerah pedesaan rendah. Hal ini menjadikan layanan jasa keuangan eksklusif bagi masyarakat desa. Eksklusivitas ini mengurangi produktivitas masyarakat sebagai upaya peningkatan taraf hidup.

Sementara itu, infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap keuangan inklusif di ASEAN. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sarma dan Pais (2011). Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang berperan penting dalam sektor perhubungan. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan distribusi barang dan mobilitas penduduk. Demikian pula

semakin baik kondisi jalan di suatu negara akan memudahkan akses masyarakat pada lembaga keuangan.

Keuangan inklusif telah tumbuh menjadi kunci utama dalam pilar AEC (Bank Indonesia, 2014). Keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, negara-negara di ASEAN memiliki tingkat keuangan inklusif pada kategori sedang. Keuangan inklusif sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan, untuk itu peran pemerintah dan pelaku sektor perbankan perlu meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keuangan inklusif di ASEAN. Semakin tinggi pembangunan manusia akan semakin meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya di perdesaan berpeluang untuk peningkatan keuangan inklusif yang berdampak pada pengurangan kemiskinan. Populasi Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat keuangan inklusif di ASEAN. Pemanfaat teknologi terutama telepon seluler dan internet dapat mengurangi hambatan geografis untuk memperluas jaringan jasa perbankan pada berbagai wilayah ASEAN. Sementara itu, infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap tingkat keuangan inklusif di ASEAN. Kebijakan pengembangan dan pembangunan fisik jalan raya semakin memudahkan kegiatan perekonomian masyarakat di ASEAN, baik untuk fungsi distribusi barang, jasa, maupun mobilitas penduduk serta daya tarik investasi..

DAFTAR PUSTAKA

- AbduRofiq, Atep, (2014), Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2014.
- Afandi, Moch. Masykur, (2011), “Peran Dan Tantangan Asean Economic Community (Aec) dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan di Asia Tenggara”, Spektrum, *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1, Januari 2011.
- Ali, I., & Son, H. (2007). Measuring Inclusive Growth. *Asian Development Review*, vol. 24, no.1, 11-31.
- ASEAN, (2014), Economic Community Chartbook. www.asean.org. Diakses tanggal 5 Maret 2016 pk 08:45 WIB.
- _____, (2014), ASEAN GDP Growth, backed by services. www.asean.org. Diakses pada tanggal 5 Maret 2016 pk 08:00 WIB.

- Bank Indonesia, (2014), Booklet Keuangan Inklusif, www.bi.go.id. Diakses tanggal 2 Maret 2016 pk 10:45 WIB.
- Cheng X, Degryse H. (2006). *Reaching Out: Access to and Use of banking Service Across Country*. World Bank Working Paper.
- International Monetary Fund (IMF), (2015), Financial Access Survey, berbagai tahun terbitan. Tersedia pada www.imf.org. Diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pk 15:00 WIB.
- Kunt A Demirguc, Beck T, Honohan P. (2008). *Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. Washington, DC (US): World Bank.
- Migap, J.P., dkk, (2015). "Financial Inclusion for Inclusive Growth: The Nigerian Perspective", *International Journal of Information Technology and Business Management*, Vol.37 No.1, 29 Mei.
- Sanjaya, I.M., (2014), "Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Tesis*, Institut Pertanian Bogor.
- Sarma Mandira, Jesim Pais. (2011). "Financial Inclusion and Development." *J Int Dev*. 23:613-628.
- _____. (2012). Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and development*. Working Paper No.07/2012.
- Steelyana, E., (2013), "Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan tentang Peran Inklusi Keuangan terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia", *Jurnal The Winners*, Vol. 14 No. 2, September 2013: 95-103.
- Ummah, B.B., (2015), "Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia". *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- UNDP, (2015), SDG's Booklet, www.undp.org. Diakses tanggal 5 Maret 2016 pk 08:00 WIB.
- United Nation. (2006). *Building Inclusive Financial Sectors for Development*. www.unctf.org/sites/default/files/Download/bluebook_0.pdf. Diakses tanggal 2 Maret 2016 pk 11:00 WIB.
- World Bank, (2013). *World Development Indicators*. <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pk 15:30 WIB.
- _____, (2015). *World Development Indicators*. Berbagai tahun terbitan. Diakses tanggal 4 Maret 2016 pk 15.00 WIB.